KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH MALUKU**	**NOMOR SOP**	:	W.28.OT.02.02-22
	TANGGAL PEMBUATAN	:	09 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFEKTIF	:	09 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah HENDRO TRI PRASETYO NIP. 196611241986031001
	NAMA SOP	:	LAYANAN LAW AND HUMAN RIGHT CENTRE

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata LetakSirkuit Terpadu; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata LetakSirkuit Terpadu; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 9. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang *Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*; 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 13. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta; 14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknolog; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak; 21. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang	1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan tingkat pusat dan daerah 2. Memahami tugas dan fungsinya dalam alur SOP 3. Memiliki kemampuan dalam pelayanan publik 4. Tidak dalam Hukuman Disiplin

Kewarganegaraan Republik Indonesia; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 23. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaan Republik Indonesia berdasarkan pasal dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris; 24. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Notaris; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian PNS; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan , Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian , Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil; 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan; 32. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Notaris; 33. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang	

Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan; 34. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa jabatan Notaris; 35. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.04.01 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Fungsi Kantor WIlayah sebagai *Law and Human Rights Center*; 36. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan; 37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS; 38. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.DL.07.01 TAHUN 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai di Llingkungan Departemen Hukum dan HAM; 39. PerKa BKN Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor KARPEG, KARIS, KARSU; 40. Keputusan Kepala BAKN Nomor 08/066/KEP/1974 tentang Kartu PNS; 41. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Kartu Istri/Suami.	
KETERKAITAN :	**PERALATAN/KELENGKAPAN:**
1. SOP Pelaporan 2. SOP Pelantikan Jabatan Notaris 3. SOP pelantikan dan pengambilan sumpah PPNS 4. SOP Permohonan pendaftaran Perseroan Perorangan 5. SOP Permohonan pendaftaran Apostille dan Legalisasi Dokumen 6. SOP Permohonan Pencatatan Hak Cipta 7. SOP Permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah PPNS 8. SOP Pengurusan perwalian anak dibawah umur 9. SOP Permohonan pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda 10. SOP Permohonan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) 11. SOP Permohonan Bantuan Hukum Gratis Litigasi dan Non Litigasi 12. SOP Permohonan Peminjaman Buku 13. SOP Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 14. SOP Permohonan pendaftaran Merek 15. SOP Permohonan pendaftaran Perseroan Perorangan 16. SOP Permohonan Ijiin Penilitian dan magang / PKL Mahasiswa/Siswa/Organisasi di UPT Pemasyarakatan 17. SOP Permohonan Penyuluhan Hukum 18. SOP Pengaduan Orang Asing 19. SOP Pengaduan korupsi, gratifikasi dan pungutan liar 20. SOP Permohonan izin mengikuti program	1. ATK, Formulir 2. Komputer/Laptop dan Printer 3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet

pendidikan 21. SOP Permohonan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami 22. SOP Permohonan pencantuman gelar	
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses layananpublik terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA					BAKU MUTU			
		Pemohon	Satuan Pengamanan (SATPAM)	Duta Pelayanan	Petugas Pelayanan Publik	Manager on Duty	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan registrai (pengisian buku tamu)						Buku Tamu	1 Menit	Mengetahui jenis layanan	
2	Menuju ruang pelayanan publik							1 Menit	Menunggu layanan di ruang pelayanan publik	
3	Pelayanan permohonan						Perangkat Komputer	10 Menit	Pemohon terlayani	
4	Informasi pelayanan dengan Manager on Duty							5 Menit	Pemohon terlayani	
5	Pengisian survei IKM						Perangkat survei IKM	1 Menit	Pemohon mengisi survei IKM	

